

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum atau pemilu menjadi salah satu elemen dasar bagi demokrasi. Pemilu yang kompetitif akan menjadi metode seleksi yang menentukan legitimasi demokratis terhadap pengelolaan otoritas publik. Hal tersebut menjadi pembeda dari metode seleksi non kompetitif. Sifat kompetitif yang melekat pada pemilu akan melegitimasi wakil rakyat untuk mengambil keputusan atas nama rakyat.¹ Berkaitan dengan pemilu tidak lupa bahwa negara Indonesia menganut sistem desentralisasi dimana didalam sebuah negara terbagi atas otonomi daerah. Didalam otonomi daerah tersebut tentu terdapat pemilihan kepala daerah dalam menegakkan demokrasi. Otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara demokratis memanglah penting untuk mewujudkan kesejahteraan umum di daerah. Dengan adanya otonomi daerah, daerah lebih total dalam melaksanakan pembangunan di daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di daerah. Dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah yang demokratis, akan memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang dinilai mampu untuk membawa kemajuan di daerahnya.²

¹ G T I Tawakkal et al., "Makna Pemilu: Ketidakrunutan Arti Penting Pemilu Bagi Pemilih," *CosmoGov: Jurnal ...* 7, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v7i1.29269>.

² Muhammad Yusrizal Adi Syaputra and Eka N.A.M. Sihombing, "RELASI ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA DENGAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA

Pada masa kampanye pilkada atau pemilihan kepala daerah tentu pasangan calon kepala daerah menggunakan berbagai cara dalam memperoleh suara masyarakat salah satunya melakukan politisasi. Politisasi merupakan suatu hal yang dihubungkan dengan politik untuk mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.³ Politisasi gencar dilakukan oleh para calon pasangan kepala daerah pada masa kampanye dengan berbagai cara dari modal sosial sebagai tempat untuk mempolitisasi sesuatu. Pasangan calon dalam melakukan politisasi tentunya menggunakan komunikasi politik dan biasanya akan menjanjikan sesuatu sehingga terjadinya timbal balik yang saling menguntungkan. Fenomena ini terjadi dikarenakan tidak cukup bagi pasangan calon hanya mengandalkan mesin partai politik tetapi perlu adanya modal sosial dalam mempolitisasi untuk memperoleh suara.

Kasus nyata yang terjadi terkait dengan politisasi seperti politisasi birokrasi, agama, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Politisasi birokrasi paling sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah dan kerap dilakukan oleh calon petahana yakni calon yang sebelumnya pernah terpilih. Politisasi birokrasi dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas negara pada saat kampanye dengan tujuan mempertahankan kekuasaan.⁴ Selain itu dalam faktanya agama juga dijadikan modal sosial untuk mempertahankan kekuasaan dimana agama yang merupakan sesuatu ajaran suci untuk mencari kebenaran dicampur adukkan oleh

(Relationship of Social and Cultural Aspects with Politics of Law on Direct Regional Head Election in Indonesia)," *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019): 339–48, <http://journal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/29269>.

³ Walid Musthafa Sembiring, "Birokrasi Dan Kekuasaan Politik Lokal: Politisasi Birokrasi Atau Birokrasi Berpolitik?," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408–20.

⁴ Sembiring.

para politikus dalam mempertahankan kekuasaan.⁵ Kelompok masyarakat sipil juga dijadikan modal sosial pejabat politik dalam pilkada seperti halnya klub sepakbola yang bisa dikatakan sebagai kelompok masyarakat sipil selain sebagai wadah olahraga. Didalam sebuah klub sepakbola tentunya memiliki suporter dengan basis pendukung yang sangat besar. Klub sepakbola maupun kelompok suporternya dikatakan sebagai kelompok masyarakat sipil dikarenakan dari berbagai kalangan dan usia baik itu pengusaha, pedagang, pelajar dan masyarakat lainnya. Sepakbola dari berbagai wilayah bukan hanya sebagai cabang olahraga namun sebagai alat perjuangan dalam melawan pemerintahan pusat.⁶ Oleh karena itu sepakbola dijadikan sebagai identitas suatu bangsa atau daerah dalam memperjuangkan kebebasan dan bentuk perjuangan tersebut dilakukan dengan cara nyanyian dan atribut suporter.⁷

Berdasarkan fakta terkait politisasi yang dilakukan pasangan calon kepala daerah bahwa terdapat modal sosial yang dibutuhkan oleh pasangan calon dalam mempolitisasi sesuatu pada masa kampanye. Selain partai politik sebagai mesin kemenangan pilkada tetapi hal tersebut tidak cukup dimana perlu adanya modal sosial sebagai dukungan politik secara langsung maupun tidak langsung. Modal sosial tersebut tentu pada awalnya bukanlah suatu kelompok yang berhubungan dengan politik tetapi merupakan kelompok masyarakat sipil yang mengalami

⁵ Siti Faridah and Jerico Mathias, "Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 3 (2018): 489–506, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>.

⁶ Nanda Rizka Syafriani Nasution and Fernanda Putra Adella, "Identitas Politik Catalonia Dalam Simbol-Simbol Football Club Barcelona," *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2018): 69–78, <https://doi.org/10.32734/politeia.v10i2.629>.

⁷ Nasution and Adella.

sebuah transformasi kearah politik akibat politisasi tersebut. Transformasi dapat diartikan sebagai perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan menyebabkan perubahan pada satu objek yang telah dihindangi oleh sesuatu tersebut. Oleh karena itu transformasi dapat menyebabkan perubahan pada satu objek tertentu.⁸ Terkait kasus nyata yang terjadi bahwa hubungan timbal balik antara pasangan calon ketika sudah terpilih dengan masyarakat tidak seimbang. Hal tersebut dikatakan sebagai patronase yakni pertukaran kepentingan namun tidak seimbang dikarenakan penguasaan secara langsung sumber daya masyarakat seperti jabatan, pekerjaan dan lisensi.⁹ Oleh karena itu dengan adanya hubungan antara pasangan calon dan masyarakat terjadi sebuah kontrak politik yang merupakan gejala dari politik transaksional.¹⁰ Kontrak politik akan menentukan kelompok masyarakat yang sudah memiliki hubungan dengan pasangan calon terpilih apakah akan mendapatkan jabatan tertentu atau keuntungan lainnya.

Dalam penelitian ini akan mengkaji terkait kasus yang terjadi pada pemilihan bupati kabupaten Bantul tahun 2020. Berdasarkan fakta yang terjadi bahwa pilkada Bantul tahun 2020 diikuti oleh dua peserta pasangan calon yakni Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo dan Suharsono-Totok Sudarto. Kedua pasangan calon gencar melakukan kampanye dengan cara mereka masing-masing.

⁸ Yunus Rasid, "Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa (Penelitian Studi Kasus Budaya Huyula Di Kota Gorontalo)," *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14, no. 1 (2013): 65–77.

⁹ Leo Agustino, "Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada Di Kabupaten Takalar Dan Provinsi Jambi," *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2014): 69–85, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>.

¹⁰ Amir Syamsuadi and MHD Rafi Yahya, "Model Kandidasi Birokrat Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015," *Journal of Governance* 3, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.31506/jog.v3i2.3868>.

Menariknya kedua pasangan calon memiliki modal sebagai calon petahana dimana Suharsono tahun lalu merupakan bupati sedangkan Abdul Halim Muslih sebagai wakil bupati dan uniknya mereka dulunya merupakan pasangan bupati dan wakil bupati yang pernah berjuang bersama di pilkada tahun sebelumnya. Dalam pertarungan pilkada tersebut kedua pasangan calon diberikan sesi debat dan visi misinya dimana Abdul Halim lebih menonjolkan pada perbaikan pemerintahan yang akan datang sedangkan Suharsono lebih ingin menjaga citra pemerintahannya yang lalu. Tak hanya itu di media sosial kedua pasangan calon saling mengkampanyekan visi misi mereka jika terpilih, selain itu para pendukung pasangan juga saling serang di media sosial. Mereka juga melakukan pendekatan terhadap organisasi masyarakat atau organisasi lainnya yang dijadikan sebagai modal sosial untuk meraih suara.

Terkait pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya penting sekali penelitian mengkaji tentang proses hubungan timbal balik politisasi yang dilakukan pasangan calon kepala daerah kepada klub sepakbola. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang keterkaitan sepakbola dan politik dalam pilkada seperti model komunikasi politik pasangan calon terhadap klub sepakbola¹¹, keterlibatan didalam internal kelompok suporter dalam menghadapi pilkada¹², investasi politik yang dilakukan oleh tokoh suporter dalam menghadapi pilkada dan faktor-faktor yang menyebabkan para pasangan calon mempolitisasi klub olahraga

¹¹ Kiki Esa Perdana and Robby Rachman Nurdiantara, “‘Bobotoh Jokowi’ Pada Pilpres 2019: Sebuah Analisis Fenomenologi Alfred Schutz,” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* XI, no. 2 (2021): 15–31.

¹² Nihayatus Sa’adah, “SEPAKBOLA DAN POLITIK STUDI KETERLIBATAN LA MANIA DALAM PEMENANGAN KANDIDAT PEMILUKADA LAMONGAN 2010,” *Jurnal Paradigma*. 1 (2013), <https://doi.org/10.4135/9781412972024.n969>.

salah satunya sepakbola.¹³ Dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya tentang model komunikasi politik, keterlibatan suporter, investasi politik dan faktor terjadinya politisasi. Melihat dari beberapa penelitian terdahulu bahwa belum terdapat masalah yang memfokuskan kepada penggunaan kelompok atau organisasi masyarakat sipil sebagai modal sosial pasangan calon kepala daerah sehingga berhasil memperoleh suara terbanyak. Padahal penting sekali kajian tersebut dilakukan untuk meneliti secara detail terkait penggunaan organisasi masyarakat sipil sebagai modal sosial pasangan calon kepala daerah sehingga berhasil memperoleh suara terbanyak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penggunaan organisasi masyarakat sipil sehingga mampu menjadi sebuah modal sosial pasangan calon kepala daerah dalam memenangi pemilihan kepala daerah dalam masa kampanye. Penelitian ini menarik dilakukan dikarenakan akan melibatkan pasangan calon yang sukses memenangkan pilkada, klub sepakbola maupun suporter dan seberapa efek yang dirasakan oleh klub sepakbola maupun suporter setelah pasangan calon tersebut sukses memenangi pilkada. Penelitian ini akan dilakukan di kabupaten Bantul dengan melibatkan Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo sebagai pasangan calon bupati-wakil bupati terpilih tahun 2020 dan klub Persiba Bantul maupun suporter Persiba Bantul. Bentuk politisasi yang dilakukan yakni pasangan Halim Joko menggandeng Persiba Bantul sebagai alat politiknya dalam meraih suara terbanyak. Politisasi tersebut

¹³ Munzir Zikrur Rahmat, Irfandi, "PERAN OLAHRAGA SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN ELEKTABILITAS POLITIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH," *Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian* 2, no. 3 (2021): 16–27.

dilakukan dengan cara Halim Joko melakukan sebuah pertemuan terbuka dengan para suporter dari berbagai komunitas. Dalam pertemuan tersebut terdapat komitmen dan janji yang diberikan Halim Joko kepada klub Persiba dan para suporter untuk kemajuan Persiba kedepannya. Selain itu pasangan Halim Joko memanfaatkan media sosial dengan memposting tentang Persiba Bantul dalam kampanyenya.

Selain itu dampak yang ditimbulkan terkait politisasi Persiba Bantul oleh Halim Joko terhadap demokrasi di kabupaten Bantul yakni tercipta sebuah stigma dari masyarakat bahwa Persiba tidak bisa terlepas dari campur tangan partai pengusung Halim Joko. Masyarakat menganggap bahwa Persiba Bantul sejak dari dulu menjadi alat Gerakan politik berbentuk sepakbola. Hal tersebut tentunya mengganggu profesionalitas Persiba Bantul sebagai klub sepakbola professional. Tidak hanya klub Persiba Bantul saja bahwa stigma masyarakat terhadap kelompok suporter Paserbumi dianggap sebagai organisasi suporter yang diisi oleh salah satu kelompok partai dari partai pengusung Halim Joko. Tentunya sepakbola yang merupakan olahraga dari seluruh kalangan di Bantul sendiri hanya dipandang sebagai klub yang diisi oleh salah satu partai tertentu.

1.2. Rumusan Masalah

Terkait informasi yang sudah dibahas sebelumnya dapat dirumuskan mengenai masalah penelitian ini dimana dalam sebuah pemilihan kepala daerah modal sosial sangatlah penting untuk mendulang suara terbanyak ketika kampanye. Modal sosial tersebut seperti birokrasi, agama dan kelompok masyarakat sipil yang

tentunya terlepas dari pengaruh politik. Berbagai permasalahan dalam fenomena politisasi sudah banyak terjadi diantaranya penggunaan fasilitas negara dalam masa kampanye pilkada. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan dimana sebuah birokrasi akan dipandang tidak netral oleh masyarakat karena politisasi birokrasi yang dilakukan oleh petahana. Selain itu agama yang merupakan ajaran suci menuju kebenaran juga dijadikan alat politisasi oleh pasangan calon dikarenakan pengaruhnya yang besar tetapi akan menimbulkan konflik yang begitu sensitif ketika agama dijadikan modal sosial kampanye. Kelompok masyarakat sipil juga sering digunakan pasangan calon dalam mempolitisasi salah satunya klub sepakbola. Oleh karena itu terjadi sebuah transformasi atau perubahan didalam klub sepakbola tersebut sehingga ikut berperan dalam ajang pemenangan politik. Hal tersebut tentu terdapat pengaruh dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan. Oleh sebab itu penelitian ini merumuskan masalah yakni “Bagaimana penggunaan Persiba Bantul sebagai modal sosial Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo sehingga dapat memenangkan pilkada Bantul tahun 2020?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian bukan hanya bertujuan sebagai syarat tertentu dalam menyelesaikan sesuatu tetapi penulis ingin memberikan gambaran kasus nyata dalam setiap kejadian. Hal ini dapat ditunjukkan pada kasus pemilihan kepala daerah kabupaten Bantul tahun 2020 yang dimenangkan oleh Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo. Pasangan calon tersebut memenangkan pilkada dengan beberapa cara kampanye salah satunya dalam hal keterkaitan sepakbola dan politik.

Tujuan dari penelitian ini dimana penulis ingin menunjukkan penggunaan kelompok masyarakat sipil sebagai modal sosial sehingga terlibat dalam politik yakni ajang pemenangan pemilihan kepala daerah. Bahwa kelompok-kelompok masyarakat sipil juga dijadikan modal sosial pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah. Salah satu kelompok masyarakat sipil tersebut yakni klub sepakbola maupun kelompok suporter sebagai modal sosial dalam pemenangan pemilihan kepala daerah. Peneliti ingin mengetahui secara mendalam penggunaan Persiba Bantul sebagai modal sosial sehingga dapat terlibat dalam urusan politik yakni pemilihan bupati kabupaten Bantul tahun 2020 yang dimenangkan oleh Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penulisan penelitian terdapat manfaat yang dapat diperoleh dan dalam sebuah penelitian terdapat dua jenis manfaat yakni manfaat teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat ditemukan manfaat teoritis antara lain :

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi kedepannya bagi pasangan calon kepala daerah dalam menggandeng organisasi masyarakat sipil sebagai modal sosial saat kampanye sehingga menciptakan hubungan timbal balik yang seimbang.
2. Penelitian ini juga bermanfaat bagi organisasi masyarakat sipil sebagai acuan dalam proses transformasi sebagai modal sosial

bagi calon pasangan kepala daerah sehingga tetap tidak melupakan pokok dasar dari terciptanya organisasi tersebut sebagai bagian dari masyarakat sipil.

b. Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat ditemukan manfaat praktis diantaranya

1. Mengkaji secara detail penggunaan Persiba Bantul sebagai modal sosial yang bermula sebagai kelompok masyarakat sipil menjadi sebuah alat gerakan politik yang dilakukan oleh Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo.
2. Oleh karena itu hasil penelitian ini bermanfaat bagi kelompok masyarakat sipil yakni memberikan pertimbangan agar tidak hanya dijadikan alat politik tetapi juga memberikan efek yang baik bagi kelompok masyarakat sipil.

1.5. Kajian Literatur

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa penelitian-penelitian terdahulu dalam penyusunannya seperti artikel jurnal dari peneliti terdahulu. Dari pembahasan sebelumnya bahwa modal sosial merupakan hal terpenting bagi calon peserta pemilu dalam memperoleh suara. Peneliti Syafri Joni Fajri dan Maria Montessori meneliti tentang Modal Sosial Pasangan Mahyeldi-Audy Dalam

Kompetisi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu informan pelaku dan informan pengamat dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi sumber guna menguji keabsahan data. Hasil penelitian bahwa tokoh calon kepala daerah memiliki modal sosial dengan memanfaatkan pengalaman jabatan partai politik, organisasi kampus dan memiliki organisasi dari kelompok pengusaha sehingga modal sosial dapat dilihat dari habitus seorang actor. Peneliti Dita Amalia Safitri, Dr. Drs. Muhammad Adnan, M.A. dengan judul Modal Sosial dan Keterpilihan Umi Azizah Pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018 menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif.¹⁵ Hasil penelitiannya yakni calon kepala daerah mampu memanfaatkan latar belakangnya yang agamis dengan menggandeng organisasi keagamaan yang memiliki basis kuat di daerah tersebut sehingga mampu memperoleh suara terbanyak. Dewi Arum Nawang Wungu dalam penelitiannya yakni Modal Sosial Dalam Keterpilihan Perempuan Calon Gubernur (Studi Kasus Karolin Margret Natassa di Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur Pada Pilkada Serentak 2018).¹⁶ Penelitian ini menggunakan teori Modal Sosial Pierre

¹⁴ Syafri Joni Fajri and Maria Montessori, "Modal Sosial Pasangan Calon Gubernur Mahyeldi-Audy Dalam Kompetisi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020," *Journal of Civic Education* 4, no. 3 (2021): 253–68.

¹⁵ D A Safitri and M Adnan, "Modal Sosial Dan Keterpilihan Umi Azizah Pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018," *Journal of Politic and Government*, 2020, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27292>.

¹⁶ Dewi Wungu, "Modal Sosial Dalam Keterpilihan Perempuan Calon Gubernur: Studi Kasus Karolin Margret Natassa Di Kalimantan Barat Dan Khofifah Indar Parawansa Di Jawa Timur Pada Pilkada Serentak 2018," *Journal of Politics and Policy* 4, no. 1 (2022): 15–31, <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2022.004.01.02>.

Bourdieu dan Robert Putnam. Metode yang digunakan yakni kualitatif dimana ditemukan hasil penelitian yakni dua tokoh perempuan yang terpilih dalam pilkada memiliki karakteristiknya masing-masing dalam memanfaatkan modal sosial dimana tokoh pertama memiliki keterikatan dan berfokus pada penguatan internal sedangkan tokoh kedua memperoleh kepercayaan yang berfungsi menjembatani kepentingan antar kelompok.

Andi Muh. Dzul Fadli, Indrawan Tobarasi, Komeyni Rusba dengan judul *Kemenangan Petahana Dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2018: Ditinjau Dari Perspektif Powercube* dengan metode penelitian kualitatif.¹⁷ Hasil penelitian dimana peserta pilkada merupakan calon petahana sehingga menggunakan beberapa strategi seperti calon tersebut melakukan investasi politik saat menjabat tahun lalu, kedua yakni politisasi birokrasi seperti memobilisasi aparatur sipil negara, ketiga calon petahana menanamkan ideologi dan nilai-nilai melalui tokoh agama dan adat. Peneliti Tawakkal Baharuddin, Titin Purwaningsih tentang *Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Kasus : Indah Putri Indriani Sebagai Bupati Terpilih di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan)* dimana peneliti menggunakan metode kualitatif.¹⁸ Hasil penelitian peneliti yakni calon peserta pilkada mampu mengetahui permasalahan di

¹⁷ Komeyni Rusba Andi Muh. Dzul Fadli, Indrawan Tobarasi, "KEMENANGAN PETAHANA DALAM KONTESTASI PILKADA SERENTAK 2018: DITINJAU DARI PERSPEKTIF POWERCUBE," *Photosynthetica* 2, no. 1 (2018): 1–13, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8><http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2><http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3><http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018><http://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3>

¹⁸ Tawakkal Baharuddin and Titin Purwaningsih, "Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015," *Journal of Governance and Public Policy* 4, no. 1 (2017): 205–37, <https://doi.org/10.18196/jgpp.4176>.

masyarakat sehingga dapat dijadikan materi dalam penyampaian kampanye dan mendapat dukungan dari keluarga, elit politik bahkan memiliki jaringan politik yang cukup luas sebagai modal politiknya. Hidayat Doe , Muhammad , Sukri , Ariana tentang Pemanfaatan Modal Sosial APPI Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar berdasarkan metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data melalui media elektronik, dokumen ilmiah, dan wawancara dengan sejumlah narasumber secara purposif.¹⁹ Hasil penelitian tersebut bahwa tokoh politik ini memanfaatkan modal sosial dengan mengutamakan jaringan-jaringan antar tokoh dalam pemenangannya di pilkada dimana jaringan antar tokoh tersebut sangat berpengaruh di daerah pilkada tersebut.

Penelitian terdahulu lainnya dengan penulis Audria Giofana, Tamrin, Indah Adi Putri tentang Modal Politik Zulefian-Reiner Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Solok Tahun 2015.²⁰ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dekriptif tipe studi kasus. Dapat ditemukan hasil penelitian ini bahwa pasangan calon mampu memenangkan pilkada dengan menggunakan modal kelembagaan, manusia, simbolik, budaya dan moral walaupun dari segi modal finansial kurang memenuhi. Peneliti Wasisto Raharjo Jati meneliti tentang Politik Selebritas Elaborasi Teoritik Terhadap Model Kampanye Baru.²¹ Metode penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan hasil penelitian dimana

¹⁹ Ariana Hidayat Doe, Muhammad, Sukri, "PEMANFAATAN MODAL SOSIAL APPI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA MAKASSAR," *Jurnal Experientia* 8, no. 2 (2020): 104–11.

²⁰ Audria Giofana, "Modal Politik Zul Elfian-Reiner Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Solok Tahun 2015," *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 1, no. 1 (2019): 16–43, <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.16-43.2019>.

²¹ Wasisto Raharjo Jati, "Politik Selebritas Elaborasi Teoritik Terhadap Model Kampanye Baru," *Jurnal Kawistara* 4, no. 2 (2014): 177–88, <https://doi.org/10.22146/kawistara.5672>.

terjadi sebuah pergeseran model kampanye dimana muncul sebuah kampanye pencitraan sehingga muncul fenomena selebritis masuk kedalam politik dengan modal sosialnya yakni popularitas dan sudah dikenal oleh masyarakat namun hanya sedikit artis yang benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat. Edah Jubaedah, Idrus Affandi, Leni Anggraeni meneliti tentang Pengaruh Calon Artis Legislatif Terhadap Perilaku Pemilih Masyarakat Di Kota Bandung.²² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif dengan hasil penelitian yakni berdasarkan fenomena yang terjadi di daerah tersebut bahwa mayoritas perilaku masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang kuat dengan calon legislatif dimana memiliki latar belakang artis. Peneliti Zaza Abizar, Iqbal Ahmady, S.IP., M.IP tentang Pengaruh Politik Dalam Permainan Sepakbola (Studi kasus Kemenangan Nazaruddin (Dek Gam) Pada Pemilu Legislatif 2019) dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.²³ Hasil penelitian tersebut bahwa pengaruh keberadaan klub lokal bagi calon legislatif tersebut sangat besar dampaknya bahkan klub yang dijadikan modal sosial diberikan suntikan dana sampai menuju liga kasta tertinggi.

Peneliti lainnya yakni Nanda Rizka Syafriani Nasution, Fernanda Putra Adella tentang Identitas Politik Catalonia dalam Simbol-Simbol Football Club Barcelona. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai analisis

²² Edah Jubaedah et al., "Pengaruh Calon Artis Legislatif Terhadap Perilaku Pemilih Masyarakat Di Kota Bandung," *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 95–98.

²³ Zaza Abizar et al., "PENGARUH POLITIK DALAM PERMAINAN SEPAKBOLA (Studi Kasus Kemenangan Nazaruddin (Dek Gam) Pada Pemilu Legislatif 2019)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 07, no. November (2022): 1–11.

data.²⁴ Hasil penelitian ini ditemukan perubahan yang terjadi dalam sepakbola dimana tidak hanya sebagai cabang olahraga tetapi dijadikan sebagai identitas sosial dalam memperjuangkan sebuah pergerakan politik dalam bentuk nyanyian suporter dan kreativitas suporter lainnya. Dani Fadillah dalam penelitiannya dengan judul Pola Komunikasi Internal Brajamusti Menjelang Pilkada Kotamadya Yogyakarta 2017.²⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian Terdapat peran internal kelompok suporter dalam pemilihan kepala daerah dimana tokoh yang berpengaruh dalam suporter melakukan investasi politik agar memperoleh suara mayoritas dalam tubuh organisasi suporter dan kelompok suporter mengarpakan adanya sebuah timbal balik yang terjadi jika tokoh tersebut terpilih. Peneliti Eko Rahmad Ramadhana dengan judul Indoneische Voetbal Bond Magelang (IVBM) : 1925-1942.²⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini yakni dalam sepakbola dapat dijadikan sebagai alat perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan oleh karena itu bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya ditransformasikan dalam sepak bola dimana aspek tersebut bisa di jadikan satu untuk alat perjuangan bangsa.

Penelitian lainnya ditulis oleh Saiful Ahmad, Aswir Faruk Badjodah, Mahmud Husein tentang Politisasi Etnis dan Pilkada, Studi Partisipasi Pemilih

²⁴ Nasution and Adella, "Identitas Politik Catalonia Dalam Simbol-Simbol Football Club Barcelona."

²⁵ Dani Fadillah, "POLA KOMUNIKASI INTERNAL BRAJAMUSTI MENJELANG PILKADA KOTAMADYA YOGYAKARTA 2017," *Kajian Ilmu Komunikasi* 47 (2017).

²⁶ EKO RAHMAD RAMADHANA, "Indonesische Voetbal Bond Magelang (Ivbm) : 1925-1942," *Avatara* 5, no. 3 (2017).

Pemula Pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara Periode 2019-2024.²⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu dengan deskriptif dan inferensial, statistik inferensial menggunakan analisis korelasional dan analisis pengaruh atau regresi. Hasil penelitian ini dimana Politisasi etnis merupakan sebuah modal bagi calon pasangan kepala daerah dalam memperoleh suara dimana etnis sebagai wakil dari kelompok tertentu menjadi kekuatan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Wimmy Halim dalam penelitiannya tentang Politisasi Program Keluarga Harapan Pra-Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang.²⁸ Penelitian ini menggunakan metode penulisan studi kasus dimana peneliti tersebut menjelaskan beberapa hasil dan pembahasan didalam penulisan penelitian tersebut. Hasil penelitian ditemukan Sebuah kebijakan dari pemerintah ternyata juga dijadikan modal bagi calon kepala daerah dalam meraih suara hal ini terjadi karena mereka mengetahui bahwa kebijakan tersebut merupakan program dengan orientasi bantuan langsung tunai yang hanya berorientasi menanggulangi kemiskinan secara instan tidak sampai dengan akarnya.

Penelitian yang ditulis oleh Rekha Adji Pratama tentang Patronase dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017 menggunakan

²⁷ Aswir Faruk Badjodah dan Mahmud Husen Saiful Ahmad, "POLITISASI ETNIS DAN PILKADA, STUDI PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN GUBERNUR MALUKU UTARA PERIODE 2019-2024," *Jurnal Syntax Transformation* 5, no. 3 (2020): 248–53.

²⁸ Wimmy Haliim, "Politisasi Program Keluarga Harapan Pada Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota Dan Kabupaten Malang.," *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 3, no. 1 (2018): 43, <https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.883>.

metode pendekatan kualitatif.²⁹ Hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk patronase dan klientalisme dapat dibagi menjadi dua yakni hubungan yang terbangun di birokrasi meliputi penentuan karir dan jabatan birokrasi sedangkan yang kedua, hubungan yang dibangun di masyarakat yaitu mobilisasi suara melalui vote buying dan pork barrel. M. Uhaib As'ad menulis tentang Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada Di Kalimantan Selatan).³⁰ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa para pengusaha tambang dilindungi oleh pejabat birokrasi sehingga para pengusaha dapat mengatur kebijakan pemerintah daerah. Penelitian lainnya yakni ditulis oleh Muhammad Nurdiyansyah tentang Komunikasi Politik Patronase NU Dalam Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020.³¹ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa patronase yang dilakukan organisasi agama dipengaruhi oleh kualitas tokoh organisasi tersebut sehingga dapat bersaing dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dapat ditemukan bahwa penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya bahwa pertama, faktor-faktor yang membuat pasangan calon mempolitisasi. Kedua, model komunikasi politik

²⁹ Rekha Adji Pratama, "Patronase, Klientalisme Dan Tahta Putra Mahkota Pada Pilkada Kota Kendari Tahun 2017," *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 1 (2017): 33–44, <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11400>.

³⁰ M. Uhaib As'ad, "KAPITALISASI DEMOKRASI DAN JARINGAN PATRONASE POLITIK (KETERLIBATAN PENGUSAHA TAMBANG DALAM PILKADA DI KALIMANTAN SELATAN)," *As-Siyasah* 1, no. 1 (2016): 34–40.

³¹ M Nurdiyansyah, "Komunikasi Politik Patronase NU Dalam Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020," *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian ...* 9, no. 1 (2021): 85–95, <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/DK/article/view/1783%0Ahttp://ejournal.unis.ac.id/index.php/DK/article/download/1783/1337>.

yang dilakukan pasangan calon dengan modal sosialnya. Ketiga, keterlibatan tokoh organisasi masyarakat sipil dalam pilkada di tubuh internal organisasi sehingga timbul investasi politik. Melihat beberapa fokus penelitian terdahulu maka belum ditemukannya focus penelitian mengenai penggunaan Persiba Bantul sebagai modal sosial pemenangan pilkada Bantul oleh Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1 Modal Sosial

Modal sosial merupakan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif oleh karena itu modal sosial memberi kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat.³² Mengenai modal sosial terdapat dua dimensi yakni dimensi kognitif dan dimensi struktural.³³ Dimensi kognitif merupakan dimensi yang lebih tertuju kepada sikap atau nilai-nilai dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi kepercayaan dan solidaritas agar tercapai tujuan bersama dan setiap kelompok masyarakat tentu memiliki dimensi kognitif yang berbeda-beda. Sedangkan dimensi struktural merupakan dimensi yang bersifat ruang lingkup

³² Muchlisin Riadi, "Pengertian, Komponen, Fungsi Dan Jenis Modal Sosia," kajianpustaka.com, 2018, <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-komponen-fungsi-dan-jenis-modal-sosial.html>.

³³ Husnul Khotimah and Ayu Dwiyah Rini, "Pengaruh Modal Sosial Terhadap Mutually Beneficial Collective Action (MBCA) Yang Dimediasi Oleh Ekspektasi Anggota Koperasi Sejati Mulya Jatipadang," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 586–497, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.534>.

organisasi atau wadah kelompok masyarakat yang bertujuan mewadahi kegiatan-kegiatan masyarakat bersifat kolektif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Terdapat beberapa fungsi modal sosial antara lain memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial, membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan, membangun partisipasi masyarakat, sebagai pilar demokrasi, sebagai alat tawar menawar pemerintah, sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang ada didalam masyarakat.

Modal sosial juga memiliki tiga jenis antara lain social bounding, social bridging dan social linking. Social bounding atau bisa disebut perekat sosial memiliki ciri khas adanya ikatan yang kuat dalam suatu sitem masyarakat dan bersifat adat istiadat atau kultural. Bahwa social bounding juga dapat diartikan sebagai ide, relasi dan perhatian yang berorientasi ke dalam dimana tipe bounding menyatukan berbagai orang baik dari segi etnis, usia, jenis kelamin dan kelas sosial. Social bridging atau biasa disebut jembatan sosial biasanya muncul dikarenakan dalam suatu kelompok sosial mereka terdapat kelemahan sehingga mereka berusaha untuk membangun kekuatan. Modal sosial dalam bentuk bridging juga dapat diartikan memiliki sifat inklusif dan berorientasi ke luar atau outward looking.³⁴ Modal sosial tipe bridging mengacu pada jaringan sosial yang menyatukan orang-orang yang tidak sama satu sama lain. Hal ini merupakan perbedaan penting dikarenakan efek eksternal dari jaringan bridging lebih mengarah ke positif sedangkan jaringan ikatan berada pada resiko yang lebih besar untuk menghasilkan

³⁴ Sauqi Futaqi, "Modal Sosial-Multikultural Pesantren Dalam Membangun Harmoni Sosial Umat Beragama," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 5, no. 2 (2020): 64–78, [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5963](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5963).

eksternalitas negatif.³⁵ Selain itu social linking atau hubungan social merupakan hubungan diantara beberapa status sosial yang ada dalam masyarakat.

Menurut Coleman bahwa modal sosial ini berada dan hidup dalam suatu relasi yang terbangun antar-individu yang membentuk adanya kewajiban sosial, saling percaya, adanya jalinan pertukaran informasi dengan berpegang pada norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁶ Menurut Putnam (1993) modal sosial dapat diartikan sebagai suatu fitur organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi. Selain itu menurut Putnam bahwa modal sosial mengacu pada hubungan antara individu-individu serta jaringan sosial dan norma-norma juga kepercayaan sehingga ia beranggapan bahwa jejaring sosial memiliki nilai dan kontak sosial mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok. Menurut Putnam terdapat beberapa indikator modal sosial antara lain partisipasi masyarakat, kepercayaan sosial dan kesukarelaan. Cohen dan Prusak (2001) memberikan pengertian bahwa modal sosial sebagai stok dari hubungan yang aktif antar masyarakat. Setiap pola hubungan yang terjadi diikat oleh kepercayaan (trust), kesaling pengertian (mutual understanding) dan nilai-nilai bersama (shared value) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Dalam berpolitik agar memperoleh suara yang banyak tentunya modal sosial sangatlah penting sehingga modal sosial memiliki tiga komponen agar

³⁵ Futaqi.

³⁶ Iyep Saefulrahman, "KEPEMIMPINAN, MODAL SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN DESA (Kasus Keberhasilan Pembangunan Di Desa Pangauban Kecamatan Cisirupan Kabupaten Garut)," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2017): 149, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11804>.

strategi politik yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Ketiga komponen tersebut antara lain kepercayaan (trust), nilai dan norma (norms), jaringan (networks).

a) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu hal yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerja sama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan berfungsi sebagai pelindung dari suatu masalah atau bahaya yang bisa saja muncul suatu saat.

b) Nilai dan Norma

Nilai merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat atau kebudayaan dimana dalam suatu tindakan jika tidak sejalan dengan nilai maka tindakan tersebut dianggap tidak sah dalam suatu masyarakat. Sedangkan norma merupakan aturan-aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berisi nilai-nilai sehingga jika ada yang melanggar norma maka akan dikenakan sanksi sosial.

c) Jaringan sosial

Jaringan sosial merupakan seorang individu bahkan kelompok yang dihubungkan dan diikat oleh kepercayaan. Jaringan sosial muncul disebabkan karena adanya kesamaan ideologi, daerah, kepercayaan politik dan agama. Suatu masyarakat akan menjadi kuat jika memiliki jaringan sosial yang luas.

Dalam berpolitik tentunya membutuhkan modal sosial sebagai alat gerakan politiknya untuk memperoleh suara terbanyak. Salah satu modal sosial yang digunakan seperti organisasi masyarakat sipil yang dapat dikatakan tidak terpengaruh oleh politik apapun. Namun akan terjadi sebuah perubahan atau transformasi dalam organisasi masyarakat sipil tersebut menjadi sebuah alat gerakan politik untuk mendulang suara. Bahwa proses transformasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kebutuhan untuk mencari sebuah identitas atau eksistensi diri dalam sebuah lingkungan, gaya hidup yang berubah disebabkan oleh pertemuan dengan budaya lain, penggunaan teknologi baru bahwa saat ini modernitas teknologi sudah mulai masuk untuk mempengaruhi perubahan fisik lingkungan, adanya emosional masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti mode dimana perubahan akan sangat cepat terjadi karena sesuatu yang masih dapat digunakan sudah dipaksa untuk dirubah demi mengikuti mode padahal yang dahulu masih dapat digunakan.³⁷

Dalam aspek sosial terdapat transformasi sosial yang berarti membicarakan tentang proses perubahan struktur, sistem sosial, dan budaya. Transformasi disatu pihak dapat bermakna proses perubahan atau pembaharuan struktur sosial, sedangkan di pihak lain mengandung arti proses perubahan nilai.³⁸ Selain itu terkait dengan transformasi sosial-budaya dapat diartikan sebagai dinamika budaya dalam

³⁷ Indah Susanti Susanti, Nitih Indra Komala Dewi, and Asep Yudi Permana, "Tatanan Teritorial Dalam Proses Transformasi Hunian," *Jurnal Arsitektur ZONASI* 1, no. 1 (2018): 27, <https://doi.org/10.17509/jaz.v1i1.11542>.

³⁸ Ernita Dewi, "Transformasi Sosial Dan Nilai Agama," *Jurnal Imlu-Ilmu Usuluddin Dan Filsafat*, no. 128 (2012): 112–21.

peradaban masyarakat manusia dengan proses yang bertahap.³⁹ Tahapan tersebut menghasilkan tipologi masyarakat dengan wujud dan karakteristik kehidupannya dimana tahapan transformasi tersebut berlangsung tidak sama. Transformasi sosial atau perubahan sosial juga dapat dibedakan menjadi dua yakni perubahan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan seperti kebijakan pemerintah dalam memajukan pembangunan sedangkan yang tidak direncanakan terjadinya perang dan bencana alam.⁴⁰

1.6.2 Patronase

Patronase merupakan pola hubungan patron dengan client dimana pola hubungan individual antara dua individu yaitu patron dan client. Dalam hal patron biasanya memiliki lebih banyak kemampuan seperti perlindungan, kasih sayang, kesejahteraan, keamanan sedangkan client atau anak buah biasanya hanya memiliki kesetiaan atau loyalitas serta tenaga untuk di berikan kepada si patron. Oleh karena itu bila hubungan ini berakhir maka keduanya akan mencari dan mungkin akan menjadi patron atau client yang baru.⁴¹ Menurut Scott patronase dapat diartikan sebagai sistem relasi personal yang di dalamnya terjadi pertukaran peran (dua orang), melibatkan persahabatan di mana seseorang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi (pelindung) menggunakan pengaruhnya dan sumber dayanya untuk

³⁹ Nurdien Harry Kistanto, "Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Indonesia," *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 13, no. 2 (2018): 169, <https://doi.org/10.14710/sabda.13.2.169-178>.

⁴⁰ Goa Lorentius, "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 2, no. Vol 2 No 2 (2017) (2017): 53–67.

⁴¹ Muhammad Misbah, "Relasi Patronase Kiai-Santri Dalam Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Ma'Hadutholabah Babakan Tegal," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 5, no. 2 (2019): 213–27, <https://doi.org/10.18784/smart.v5i2.817>.

menyediakan perlindungan atau manfaat, atau keduanya, untuk orang yang statusnya lebih rendah (klien) yang pada gilirannya secara timbal balik dengan menawarkan dukungan dan bantuan umum, termasuk layanan pribadi, kepada pelindung.⁴² Selain itu patronase dipandang oleh Karl Marx dengan selalu melihat hubungan patronase sebagai bentuk eksploitasi atas individu terhadap individu lainnya.⁴³ Menurut Pelras bahwa patronase terdapat hubungan yang tidak sejajar meski hubungan itu tidak bersifat dinamis namun relasi itu menunjukkan adanya otoritas dimiliki seorang patron yang dapat mengatur pihak klien sesuai yang dikehendaknya.⁴⁴ Oleh karena itu patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya yang didistribusikan oleh politisi seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak-kontrak proyek, termasuk juga keuntungan yang ditujukan untuk dikuasi individu dan kelompok atau komunitas. Patronase dapat diartikan juga sebagai konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron di satu pihak dan klien di pihak yang lain. Ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkait erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Karena itu, dalam fenomena seperti ini interelasi telah diikat oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-masing-walaupun kedua-duanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang⁴⁵.

⁴² ABDUL CHALID, "POLITIK PATRONASE DI KECAMATAN BONTOA, KABUPATEN MAROS," *Ekp* (UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2017).

⁴³ CHALID.

⁴⁴ CHALID.

⁴⁵ Leo Agustino and Sayed Fahrul, "Patronase Dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018," *Journal of Governance* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3099>.

Sementara itu terdapat perbedaan antara patronase dan klientelisme dimana klientelisme lebih mengarah kepada hubungan dekat antara patron dengan klien sedangkan patronase lebih mengarah kepada pertukaran keuntungan dengan tujuan mendapat dukungan politik. Menurut Aspinall klientelisme memiliki tiga tipologi antara lain broker aktivis yang mendukung kandidat karena kedekatan dan loyalitas biasanya merupakan keluarga terdekat maupun para loyalis partai atau kandidat. Kedua klien pialang yakni kelompok yang mengharapkan imbalan jangka panjang seperti proyek pemerintahan dan ketiga broker oportunistis yang mengharapkan imbalan dalam waktu singkat⁴⁶. Terkait teori klientelisme menurut Tomsa dan Ufen, klientelisme memiliki beberapa elemen seperti iterasi, asimetri dan resiprositas. Menurut Aspinall klientelisme juga memiliki beberapa elemen seperti resiprositas, personalitas, iterasi dan hirarki.⁴⁷ Dalam sebuah patronase terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antar pihak seperti halnya dalam aspek politik dimana terdapat patronase politik didalamnya. Patronase politik dapat diartikan sebagai bentuk patronase yang dalam prosesnya memberikan bantuan kepada masyarakat atau lembaga masyarakat yang merasa membutuhkan sesuatu kemudian dipenuhi oleh calon kandidat dengan tujuan untuk memperoleh suara dari lembaga masyarakat tersebut. Terdapat beberapa cara atau bentuk

⁴⁶ Rika Yanita Susanti and Khairul Fahmi, "Relasi Birokrat Dan Politisi Dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020," *Indonesian Journal of Religion and Society* 4, no. 1 (2022): 41–49, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v4i1.240>.

⁴⁷ Iqbal Arif Siregar, "Klientelisme Politik Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Di Kabupaten Labuhanbatu," *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 2, no. 2 (2020): 120–39, <https://doi.org/10.25077/jdpl.2.2.120-139.2020>.

patronase politik yang biasanya dilakukan seperti pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan, barang-barang kelompok dan proyek gentong babi.⁴⁸

a. Pembelian suara

Bentuk pembelian suara atau vote buying dapat diartikan sebagai proses pembayaran atau pemberian uang kepada pemilih dengan tujuan agar pemilih benar-benar memilih calon kandidat yang memberikan uang tersebut. Dalam proses pemberian uang tersebut biasanya calon kandidat tidak langsung memberikan kepada pemilih tetapi melalui tim sukses calon kandidat tersebut.

b. Pemberian-pemberian pribadi

Pemberian-pemberian pribadi atau juga disebut individual gift memiliki arti suatu bentuk patronase dimana calon kandidat memberikan barang-barang bersifat pribadi kepada pemilih seperti kalender, jam atau sembako sehingga dengan pemberian tersebut terdapat ikatan moral dengan para pemilih.

c. Pelayanan

Pelayanan dapat diartikan sebagai bentuk patronase yang dilakukan oleh calon kandidat dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pemberian mobil ambulans kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya sehingga masyarakat akan memilih calon kandidat tersebut.

⁴⁸ Silvia Rahmi Putri, “‘ Kampung Jokowi ’ Di Nagari : Studi Tentang Strategi Pemenangan Pemilihan Umum Rumah Kerja 01 Indonesia Di Jorong Taratak Nagari Situjuh Tungka Kabupaten Limapuluh Kota,” *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 2, no. 2 (2020): 93–104.

d. Barang-barang kelompok

Barang-barang kelompok merupakan bentuk patronase dimana calon kandidat memberikan barang-barang yang dibutuhkan oleh suatu kelompok atau perkumpulan organisasi yang melibatkan orang banyak sehingga harapannya suatu kelompok tersebut akan memilih calon kandidat yang sudah memberikan barang-barang tersebut.

e. Proyek-proyek gentong babi

Proyek-proyek gentong babi dapat diartikan sebagai proyek pemerintah yang ditunjukkan untuk wilayah tertentu dengan ciri khasnya yakni kegiatan tersebut ditunjukkan kepada public dan didanai oleh public dengan harapan public dapat memberikan dukungan. Calon kandidat dalam prosesnya berjanji memberikan program yang didanai oleh public untuk komstituen mereka yang biasa berupa proyek-proyek infrastruktur berskala kecil atau keuntungan tertentu terutama untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

1.7. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep pada penelitian. Oleh karena itu definisi konseptual dalam penelitian ini diantaranya:

a. Modal Sosial

Berdasarkan teori modal sosial menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa modal sosial merupakan hubungan antar individu atau jalinan komunikasi masyarakat yang kemudian timbul saling percaya antar pihak dan mengacu pada kepercayaan, jaringan sosial, nilai dan norma.

b. Patronase

Dari beberapa teori para ahli patronase dapat diartikan sebagai hubungan individu dimana salah satunya memiliki kekuatan yang besar atau status sosial yang lebih tinggi sehingga dapat disebut sebagai patron. Sedangkan individu yang lain memiliki status sosial yang lebih rendah atau disebut sebagai client. Oleh karena itu patron memberikan fasilitas kepada client dengan harapan client memberikan dukungan terhadap patron. Patronase juga memiliki bentuk-bentuk dalam melakukan relasi seperti pelayanan, pemberian-pemberian pribadi, pembelian suara, barang-barang kelompok dan proyek gentong babi.

Selain itu berdasarkan beberapa teori ahli tentang klientelisme memiliki empat elemen antara lain asimetris, iterasi, personalistik dan resiprositas. Oleh karena itu antara patronase dengan klientelisme menurut beberapa ahli memiliki perbedaan yakni patronase lebih tertuju kepada barang dan manfaat yang didistribusikan melalui pertukaran klientelistik

sedangkan klientelisme terdapat hubungan asimetris yang saling menguntungkan.

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah indikator yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan data lapangan. Dalam penelitian ini akan menggunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 1.1 Definisi Operasional Penelitian

No	Variabel	Indikator	Parameter
1	Modal Sosial	1. Partisipasi Masyarakat 2. Kepercayaan Sosial 3. Kesukarelaan	Tingkat partisipasi masyarakat terkait pilkada dalam organisasi masyarakat sipil, kepercayaan masyarakat terhadap calon kandidat dan kemauan organisasi ketika dipolitisasi.

2	Patronase	1. Pertukaran Keuntungan 2. Relasi 3. Eksploitasi	Bentuk proses pertukaran yang terjadi sehingga timbul hubungan saling menguntungkan, proses pola hubungan antar tokoh baik dari pihak organisasi dengan calon kandidat sehingga terbentuk jalinan kerjasama, pola komunikasi atau jaringan calon kandidat terhadap organisasi masyarakat sipil dan tingkat kekuasaan yang dimiliki calon kandidat terhadap organisasi masyarakat sipil.
---	-----------	---	---

1.9. Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (1986) pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif bahwa metodologi kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan

dalam peristilahannya.⁴⁹ Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, instropeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif.⁵⁰ Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dapat memudahkan peneliti untuk meneliti lebih dalam dan memahami terkait penggunaan organisasi masyarakat sipil sebagai modal sosial pemenangan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian dengan pendekatan metode kualitatif akan menjelaskan secara detail proses transformasi kelompok masyarakat sipil dalam keberhasilan pasangan calon kepala daerah.

1.9.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yakni bupati-wakil bupati kabupaten Bantul dimana pada tahun 2020 saat pilkada serentak menjadi pasangan calon terpilih, tim sukses pasangan Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo dalam pilkada Bantul 2020, tim official Persiba Bantul dan tokoh suporter Persiba Bantul. Sedangkan objek penelitian ini yakni penggunaan Persiba Bantul sebagai modal sosial

⁴⁹ Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016), <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>.

⁵⁰ Galang Surya Gumilang.

pemenangan Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo dalam pilkada Bantul tahun 2020.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian tentunya perlu adanya sebuah pengumpulan data sehingga dapat ditemukan hasil dari penelitian tersebut. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

1) Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data penelitian secara mendalam. Wawancara dapat diartikan juga sebagai salah satu tipe komunikasi interpersonal dimana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab.⁵¹ Keefektifan wawancara ditentukan oleh sejauh mana informasi yang ingin dikumpulkan telah tercapai. Oleh karena itu agar informasi penting yang diinginkan dapat diperoleh dari pihak narasumber maka seorang pewawancara perlu membuat semacam pedoman wawancara yang berisi pertanyaan penting yang akan diajukan.

⁵¹ Heni Widiastuti, Ferry VIA Koagouw, and Johnny S Kalangi, "Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7," *Jurnal Acta Diurna* 7, no. 2 (2018): 1–5.

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai langsung Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo sebagai calon terpilih atau pihak tim sukses saat pilkada Bantul tahun 2020. Selain itu agar menguatkan data berdasarkan permasalahan penelitian dimana peneliti juga akan mewawancarai pihak manajemen Persiba Bantul dan tokoh berpengaruh dari suporter Persiba Bantul. Terkait teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dimana peneliti akan mewawancarai narasumber pertama kemudian memvalidkan data yang diperoleh dengan narasumber lainnya.

Tabel 1.2 Daftar Narasumber di Kabupaten Bantul

No.	Nama Narasumber	Data yang Dibutuhkan
1	Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo (Bupati dan Wakil Bupati terpilih kabupaten Bantul tahun 2020)	Sejauh mana parameter keberhasilan pasangan Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo dalam melakukan komunikasi dan memperkuat jaringan terhadap klub Persiba Bantul.
2	DPC PDI Perjuangan (bagian pemenangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Bantul tahun 2020)	Strategi pemenangan Abdull Halim Muslih dan Joko Purnomo dalam menggaet organisasi masyarakat sipil untuk bekerja sama sehingga tercapai keberhasilannya.
3	Tim official Persiba Bantul	Tahapan kerjasama dan transformasi klub Persiba Bantul terhadap pemenangan Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo dan pertukaran keuntungan yang terjadi.

4	Tokoh organisasi suporter Persiba Bantul	Sejauh mana parameter keberhasilan keterlibatan suporter terkait penggunaan Persiba Bantul sebagai modal sosial dalam pemenangan Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo dan pertukaran keuntungan yang terjadi.
5	Tim sukses pemenangan Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo	Strategi pemenangan yang dilakukan sehingga dapat melakukan kerjasama dengan Persiba Bantul sebagai modal sosial.

2) Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan secara sempit sebagai hanya membatasi pada objek dokumen dua dan tiga dimensi yang mati kemudian ditambahkan dan mencakup juga objek tiga dimensi hidup. Secara luas dokumentasi dapat diartikan bahwa dokumen sudah tidak hanya terbatas pada fisik dokumen, namun juga meliputi semua yang berpotensi dan dianggap sebagai dokumen meski dalam bentuk virtual sekalipun.⁵² Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dokumentasi seperti foto lokasi penelitian dan arsip-arsip yang berkaitan dengan rancangan pemenangan Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo saat pilkada Bantul tahun 2020.

⁵² Widiastuti, Koagouw, and Kalangi.

1.9.4 Teknik Analisa Data

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (1994) reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Hal tersebut dilakukan dengan cara seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.⁵³

Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data sehingga tidak bersifat sekali jadi tetapi secara bolak balik, perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif

⁵³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

bahkan melingkar. Kompleksitas permasalahan bergantung pada ketajaman pisau analisis.⁵⁴

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses untuk mengumpulkan berbagai informasi yang sudah diperoleh sehingga akan dilakukan sebuah penarikan kesimpulan. Berdasarkan menurut Miles dan Huberman (1994) penyajian data dapat diartikan sekumpulan informasi yang disusun lalu memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data menggunakan pendekatan kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini terkait penyajian data menggunakan narasi dalam bentuk catatan lapangan kemudian menggabungkan susunan informasi sehingga dapat memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar,

⁵⁴ Rijali.

tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan.
bermula belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan
mengakar dengan kokoh.